

33 Calon Jemaah Haji Asal Tangsel Gagal Berangkat ke Tanah Suci

TANGSEL (IM) - Sebanyak 33 orang calon jemaah haji asal kota Tangerang Selatan gagal berangkat ke tanah suci dikarenakan beberapa kendala yang dialami oleh jemaah tersebut seperti ada yang sakit. "Jemaah haji di kota Tangsel yang berangkat sebanyak 617 orang itu tahap finalisasinya, sedangkan 33 orang gagal berangkat di tahun ini," kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kota Tangerang Selatan, Dedi Mahfudin, Selasa (7/6).

Menurut Dedi, jemaah yang berangkat tahun ini adalah jemaah yang harusnya berangkat pada tahun 2020 lalu, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pada saat itu maka ibadah haji ditunda keberangkatannya.

"Ada tiga kloter yang berangkat dari kota Tangerang Selatan, jemaah kloter pertama berangkat pada tanggal 10 juni, kloter kedua 17 juni dan kloter ketiga 19 juni 2022," ujarnya.

Bagi jemaah yang gagal berangkat, kata Dedi dikarenakan faktor usia yang sudah melebihi 65 tahun, jemaah yang sakit serta jemaah yang telah meninggal dunia atau jemaah yang mengundurkan diri.

"Tahun ini batas usia untuk jemaah yang pergi haji 65 tahun, itu regulasinya dari Arab Saudi. Apabila jemaah yang gagal berangkat dananya akan dikembalikan secara keseluruhan," ungkapnya.

Dedi juga menjelaskan jemaah haji yang gagal berangkat karena suaminya berusia 65 tahun ke atas dan istrinya 65 tahun kebawah maka hanya istrinya yang diperbolehkan berangkat. "Kalau yang seperti itu istrinya menunda keberangkatan karena tidak bareng dengan suaminya, jadi mereka mau bersama-sama berangkatnya," imbuhnya. ● pp

Kejaksaaan Didorong Turun Tangan Atasi Dugaan Pungli di Samsat Cikokol

TANGERANG (IM) - Pengamat dan analis kebijakan publik, Adib Miftahul, mendorong Kejaksaaan untuk turun tangan menangani dugaan pungutan liar (pungli) di Samsat Cikokol, Kota Tangerang.

Seperti diketahui, pengecekan fisik kendaraan bermotor seperti pengecekan nomor rangka dan mesin kendaraan di Samsat Cikokol berbayar Rp30 ribu. Selain itu, pengambilan nomor kaleng dan plastik untuk STNK juga berbayar Rp5 ribu.

Menurut Adib, masyarakat yang ingin melakukan kewajibannya dengan membayar pajak saja sudah bagus dan patut diapresiasi, karena memberikan kontribusi kepada negara.

Namun, bila pelayanan di Samsat Cikokol tidak ramah, lambat, dan terdapat pungli, tentunya harus dibereskan. Adib mendorong Kejaksaaan untuk turun tangan memeriksa pungli ini.

"Kejaksaaan harus turun tangan tuh ke Samsat. Bisa jadi ini pembiaran yang sudah lama. Kepala Samsatnya diperiksa itu. Orang bayar pajak kan sudah baik berkontribusi pada negara," jelasnya, Selasa (7/6).

Dosen UNIS Tangerang ini menuturkan, segala hal dan sesuatunya sudah diatur. Jika tidak ada aturannya, tetapi harus diminta untuk bayar, tentu termasuk tindakan pungli.

Adib mengkalkulasi jika satu kendaraan bermotor harus berbayar Rp35 ribu tanpa kuitansi, dan dikalikan dengan jumlah wajib pajak yang mengurus kendaraan tersebut, sangat banyak keuntungan sampingan Samsat Cikokol.

"Ya kalau 1.000 kendaraan sehari, tinggal dikalikan saja jadi berapa. Intinya semua harus sesuai regulasi," katanya.

Adib menambahkan, seharusnya masyarakat tidak perlu lagi dibebani dengan membayar hal di luar ketentuan sebagai wajib pajak.

"Orang mau bayar pajak saat ekonomi sulit kan sudah bagus, masyarakat jangan dibebani lagi," pungkasnya. ● pp



PERSIAPAN HARI RAYA GALUNGAN DI TANGERANG

Sejumlah umat Hindu membuat penjor di Pura Parahyangan Jagat Guru, Serpong Tangerang Selatan, Banten, Selasa (7/6). Menjelang Hari Raya Galungan pada Rabu (8/6) umat mulai menyiapkan sejumlah kebutuhan untuk sarana upacara merayakan kemenangan "Dharma" atau kebaikan di atas "Adharma" atau kejahatan.

Daftar Tunggu Jemaah Calon Haji Kabupaten Lebak Hingga 25 Tahun

LEBAK (IM) - Daftar tunggu pemberangkatan jemaah calon haji di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ke Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi, dipastikan hingga mencapai 25 tahun atau sampai 2047.

"Sampai hari ini jumlah pendaftar jemaah calon haji (JCH) tercatat 18.000 orang," kata Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, H Achmad Firdaus di Lebak, Selasa (7/6).

Panjangnya daftar antrean JCH itu, karena proses pendaftaran untuk melaksanakan rukun Islam kelima terus bertambah.

Mereka para pendaftar haji itu antara 10 sampai 15 orang per hari.

Meski daftar tunggu haji berlangsung selama 25 tahun ke depan, namun tetap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak melayani masyarakat.

Panjangnya antrean daftar haji itu, kata dia, ditambah sejak dua tahun terakhir pemerintah tidak memberangkatkan JCH akibat pandemi COVID-19.

Namun, Pemerintah Indonesia tahun 2022 ini sudah kembali memberangkatkan JCH ke Mekkah, walaupun kuotanya relatif kecil dibanding sebelumnya.

"Kami berharap tahun depan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bisa menambah kembali kuota untuk Indonesia," kata Firdaus.

Menurut dia, kemungkinan besar antrean pendaftar haji itu bisa mencapai 20 ribu lebih dan pemberangkatan sampai 30 tahun.

Saat ini, kata dia, perekonomian nasional kembali pulih pascapandemi COVID-19, sehingga banyak masyarakat yang mendaftarkan diri ke JCH tersebut.

Pemberangkatan JCH tahun ini sebanyak 295 orang dan berkurang kuota dibandingkan normalnya di atas 800 orang.

"Kami berharap JCH yang berangkat tahun ini menjadi haji mabrur dan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat," katanya menambahkan.

Sementara itu, Muhammad Sabar (55), warga Rangkasbitung mengatakan dirinya bersama isteri mendaftarkan haji dan tidak mengetahui kapan bisa diberangkatkan ke Mekkah, Arab Saudi.

"Yang pasti kita daftar dulu dan mudah-mudahan dengan waktu tidak lama bisa melaksanakan rukun Islam kelima itu," kata Sabar. ● pra

RENCANA KENAikan TARIF NAIK KE BANGUNAN CANDI BOROBUDUR

Pengunjung berwisata di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (7/6). Pemerintah berencana menerapkan tarif naik ke bangunan Candi Borobudur sebesar Rp750 ribu bagi wisatawan lokal dan 100 dolar Amerika untuk wisatawan asing yang mendapatkan tanggapan beragam pro dan kontra di kalangan masyarakat.



Sungai Cisadane Tercemar Parah, Warga Kabupaten Tangerang Paling Terdampak

Persoalan ini sudah berlangsung lama sekali, mungkin semua pihak baik itu pemma dan pemerhati lingkungan sudah berbuat dan bekerja. Hanya kalau bekerja masing-masing hasilnya tidak optimal, mengingat karakter sungai itu pada umumnya ada hulu dan hilir," jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Taufik, dikonfirmasi, Selasa (7/6).

Dia berharap, sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten yang dilintasi aliran Sungai Cisadane bisa terjalin agar sungai yang airnya digunakan sebagai baku air PDAM Kabupaten Tangerang itu tidak terus tercemar.

sungai terus memburuk.

"Persoalan ini sudah berlangsung lama sekali, mungkin semua pihak baik itu pemma dan pemerhati lingkungan sudah berbuat dan bekerja. Hanya kalau bekerja masing-masing hasilnya tidak optimal, mengingat karakter sungai itu pada umumnya ada hulu dan hilir," jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Taufik, dikonfirmasi, Selasa (7/6).

"Maka saran kami harus dilakukan pertemuan secara menyeluruh diikuti oleh pusat, provinsi dan pemma-pemma yang teraliri sungai tersebut," jelas Taufik.

Masalah dari Hulu

Menurut dia, wilayah Kabupaten Tangerang, yang berada di hilir aliran sungai, paling terdampak pencemaran Sungai Cisadane. Kawasan ini kerap mendapat kiriman sampah di aliran sungai yang hulunya di Bogor itu.

"Masalah terberat adalah Kabupaten Tangerang, karena aliran sungai dari hulu katakanlah dari Bogor, melewati Tangsel, melewati Kota Tangerang, nah hilirnya sampah tersebut ada di Kabupaten Tangerang," terangnya.

Taufik menyatakan, pihaknya telah berupaya menjangkau tumpukan sampah yang ikut terbawa arus aliran sungai. "Upaya sudah kami lakukan dengan menugaskan pegawai untuk monitor sampah, saat masih sedikit dijaring, ditarik ke atas. Dari atas baru diangkat dengan truk sampah, begitu seterusnya. Masalah sungai juga ada keterlibatan atau kewenangan pusat atau provinsi yaitu Balai Besar, mudah-mudahan masukan ini menjadi manfaat," ungkap Taufik.

Sebelumnya aktivis lingkungan menyatakan kondisi Sungai Cisadane semakin mengkhawatirkan. Sungai yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten itu tercemar mikroplastik, sampah plastik tak kasat mata. ● pp

Pemko Medan Resmi Larang Penjualan Daging Anjing

MEDAN (IM) - Pemerintah Kota (Pemko) Medan resmi melarang penjualan daging anjing secara komersial di seluruh wilayah kota tersebut. Larangan itu termaktub dalam surat edaran nomor 440/4676 tertanggal 22 April 2022 tentang pengawasan peredaran daging anjing secara komersial.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis, membenarkan perihal surat edaran itu. Ia menyebut, latar belakang keluarnya surat edaran itu berawal dari desakan salah satu aliansi pecinta hewan. Mereka meminta Pemko Medan mengeluarkan kebijakan yang melarang penjualan daging anjing secara komersial.

"Dasar kita selanjutnya mengeluarkan surat edaran itu lantaran anjing bukan makanan, bukan hewan konsumsi, tapi hewan peliharaan," ucap Emilia, kemarin. Ia menekankan, surat edaran Wali Kota Medan itu bukan untuk melarang orang memakan daging anjing.

"Dalam surat imbauan wali kota, itu bukan melarang orang makan anjing, tapi tak boleh diperjualbelikan secara komersial seperti daging kambing, sapi, dan lainnya," ujarnya.

Menurutnya, memakan daging anjing bisa berisiko terkena penyakit menular dari hewan.

"Kita tak bisa larangan orang makan daging anjing. Tapi kita khawatir rabies, zoonosis, penyakit dari hewan ke manusia," ucapnya.

Emilia juga mengatakan, surat edaran ini sudah disosialisasikan ke masing-masing OPD dan kecamatan yang ada di Kota Medan.

"Nanti biar Pak Camat yang menyosialisasikan ke warga," katanya.

Namun, Emilia mengaku hingga saat ini, tidak ada penjualan daging anjing di pasar-pasar tradisional di Kota Medan.

"Sejauh ini belum ada di Medan, enggak ada yang jual daging anjing. Ini hanya mengimbau," tuturnya. ● pra

Wali Kota Tangerang: Jangan Bahayakan Nyawa Hadang Truk Demi Konten

TANGERANG (IM) - Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah mengimbau kepada orang tua untuk mengawasi kegiatan anak-anaknya, khususnya yang membuat konten dengan menghadang truk di jalan karena membahayakan nyawa.

"Jangan sampai hanya demi konten media sosial, anak kita membahayakan nyawanya seperti konten menghadang truk di jalanan," kata Wali Kota Arief di Tangerang Selasa (7/6).

Ia berharap agar para orang tua mencurahkan perhatian kepada anaknya dan melakukan pengawasan. "Kita jaga generasi penerus bangsa di Kota Tangerang," ujarnya.

Sebelumnya, pada hari Jumat (3/6) siang telah terjadi peristiwa, yakni seorang anak meninggal karena tertabrak mobil kontainer di depan SPBU Gerendeng.

Dalam video yang viral diunggah akun media sosial instagram abouttingid, gerombolan remaja tampak menghentikan laju kontainer namun satu orang tertabrak karena tak sempat

menghindar.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan masih melakukan pemeriksaan terhadap supir kontainer dan mengumpulkan keterangan dari teman korban. "Masih dalam proses dan akan gelar perkara nantinya," ujarnya kepada media. Sementara korban meninggal benisial Y sudah diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan. Kedepannya kepolisian akan melakukan peningkatan patroli.

Lalu pada hari Selasa (7/6) pukul 00.35 WIB yang dipublikasikan melalui akun media sosial abouttingid, terjadi lagi seorang anak yang meninggal akibat tertabrak kendaraan truk setelah mencoba mengadangnya. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan M. Toha dan kondisi anak tersebut meninggal dunia dengan luka serius. "Terjadi lagi, akibat bikin konten. Jalan Moh Toha depan gerai Mr. Ponsel, dekat Dominos Pizza. cegat kontainer," ujar pelapor ke akun abouttingid. ● pp

Atasi Masalah Sampah di Tangsel, DPRD Dorong Perwal Penggunaan Plastik

TANGSEL (IM) - Sampah plastik menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan. Mereka mendorong lahirnya aturan dan penegakan yang lebih serius untuk meminimalisasi penggunaan plastik pada kehidupan sehari-hari.

"Masalah sampah plastik di Kota Tangerang Selatan harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah kota, masyarakat, dan dunia usaha. Bahwa kita bersama harus berkomitmen ikut serta dalam menekan penggunaan plastik," kata Ketua Fraksi Gerindra - PAN Kota Tangerang Selatan, Ahmad Syawqi di kantor DPRD Tangsel, Selasa (7/6).

Syawqi menambahkan, selain komitmen kuat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, pembatasan penggunaan plastik juga harus diatur lebih jelas, agar hasilnya benar-benar seperti yang diharapkan.

Dia menerangkan, sebenarnya Kota Tangerang Selatan telah memiliki aturan yang jelas terhadap pengelolaan sampah, termasuk mengolah jenis sampah plastik.

"Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Per-

da) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dalam Pasal 32A yang berbunyi pemerintah daerah dapat melakukan pengurangan sampah plastik dan alat bantu/wadah/kemasan makanan dan minuman yang berasal dari bahan plastik," jelasnya.

Selanjutnya, dalam perda itu disebutkan pula bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengurangan sampah plastik dan alat bantu/wadah/kemasan makanan dan minuman diatur dengan peraturan walikota (perwal).

"Maka perlu adanya Perwal yang mengatur tentang pengurangan sampah plastik dan kami mendorong agar Wali Kota Tangsel, untuk segera membentuk Perwal pengurangan sampah plastik, sebab Perwal tersebut menjadi amanah Perda sebagai upaya penanganan masalah sampah plastik di Kota Tangsel," ucapnya.

Terpisah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan mengungkapkan 50 persen volume sampah di Tangsel terdiri dari sampah-

sampah nonorganik, termasuk plastik dan lainnya.

Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Tangerang Selatan, Rastra Yudhatama menerangkan kalau 50 persen volume sampah nonorganik itu terdiri dari beberapa bahan yang dapat diolah kembali. Jumlah sampah kertas mencapai 13,45 persen dan sampah plastik mencapai 9,82 persen.

"Jadi kalau dilihat dari jumlahnya berdasarkan kajian dari tim konsultan. Jumlah sampah nonorganik yang dihasilkan 50,24 persennya adalah sampah nonorganik," jelas Rastra.

Sementara itu, volume sampah organik yang dihasilkan di Tangerang Selatan mencapai 49,71 persen.

Rastra mengaku, pihaknya saat ini tengah menyiapkan rancangan peraturan wali kota (raperwal) terkait pengendalian sampah di Tangsel. Dengan Perwal itu, diharapkan volume sampah di Tangsel, bisa jauh menurun.

"Utamanya untuk sampah non organik. Ini (raperwal) belum final, saat ini masih kajian DED oleh konsultan mudah-mudahan bisa dijalankan di tahun ini," kata dia. ● pp



PEMBINAAN KOMUNIKASI CEGAH KONFLIK SOSIAL

Sejumlah elemen masyarakat berfoto bersama prajurit TNI saat mengikuti Pembinaan Komunikasi Cegah Konflik Sosial di Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, Selasa (7/6). Kegiatan yang diikuti sejumlah elemen masyarakat tersebut sebagai upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan, dan membangun sistem peringatan dini.